

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN LABORATORIUM DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS KALIMANTAN BARAT

Author

Verlyana Risyah¹, Silverius Tey Seran²

Affiliasi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat

Email:

verlyanarisyah@gmail.com¹ silverius@ipdn.ac.id²

Received: Nov-02-2023

Revised: Nov-19, 2023

Accepted: Des-03, 2023

Available Online: Des-03, 2023

Corresponding author

Silverius Tey Seran

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

e-Mail: silverius@ipdn.ac.id

Abstract

This study aims to describe the strategic plan in the development of laboratories at the Institute of Domestic Government, West Kalimantan Campus. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques namely observation, interviews, and documentation, as well as data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research also uses SWOT Analysis to analyze aspects of strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the strategic plan for laboratory development and information technology. The results showed that the implementation of laboratories at IPDN West Kalimantan was not optimal due to several things, including the unavailability of qualified human resources in laboratory management, minimal supporting infrastructure, and internal educational curriculum factors that had not been compiled in an integrated manner by relevant stakeholders.

Keywords: Strategic Plan, Laboratory, Education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rencana strategis dalam pengembangan laboratorium di Insititut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan Analisis SWOT untuk menganalisa aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada rencana strategis pengembangan laboratorium dan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Laboratorium di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat belum optimal dikarenakan beberapa hal diantaranya yaitu, belum tersedia SDM yang mumpuni dalam pengelolaan laboratorium, prasarana penunjang yang masih minim, serta faktor kurikulum internal pendidikan yang belum disusun secara integrasi oleh stakeholder terkait

Kata Kunci : Rencana Strategis, Laboratorium, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”, diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024).

Salah satu fokus utama pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari RPJMN 2020-2024 serta kebijakan pembangunan yang diusung Presiden Joko Widodo pada Periode Pertama Pemerintahannya tahun 2019-2023 adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan angka stunting, kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.

Hasil studi *growth* Bappenas Tahun 2018 menyatakan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2010-2018 cenderung mengalami perlambatan dan stagnan dengan beberapa faktor penghambat pertumbuhan ekonomi diantaranya regulasi dan institusi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, rendahnya penerimaan pajak, kurang memadainya infrastruktur yang menunjang konektivitas antar lini, serta yang paling krusial adalah kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk dapat bersaing secara lokal maupun global. Dari empat faktor tersebut, faktor regulasi dan faktor SDM merupakan faktor yang sangat krusial untuk segera diatasi, agar Indonesia bisa bersaing di era digital.

Isu krusial terkait dengan penyederhanaan regulasi dan institusi serta birokrasi mulai menemui titik terang sejak pemerintah mencetuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja dengan metode *Omnibus Law* yang tujuan utamanya tidak lain adalah menyederhanakan dan mengharmonisasi regulasi dan perizinan, meningkatkan kualitas investasi, menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta makin memberdayakan (Usaha Mikro Kecil Menengah) UMKM dalam peningkatan ekonomi rakyat. Dilain sisi untuk meningkatkan kualitas institusi pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi dengan mengurangi sebagian besar Esselon IV (Jabatan Pengawas) dan Esselon III (Jabatan Administrator) yang kemudian dialihfungsikan menjadi pejabat fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan serta meningkatkan profesionalitas aparatur negara.

Isu pembangunan sumber daya manusia di Indonesia sampai saat ini merupakan isu yang sangat krusial, dimana secara umum terdapat 4 (empat) isu dan tantangan terkait dengan pembangunan sumber daya manusia diantaranya, produktivitas yang rendah, institusi pendidikan yang belum mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas serta era disrupsi teknologi yang merubah karakteristik tenaga kerja.

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelaksanaan pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi adalah salah satu langkah

konkret untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing pada setiap sektor, baik pada *sector riil* yang berkaitan langsung dengan kegiatan perekonomian, misalnya pariwisata, transportasi, otomotif ataupun pada sektor penopang semisal vokasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh IPDN.

IPDN berkonsentrasi pada pendidikan tinggi kepomongprajaan dengan tujuan menghasilkan kader pemerintahan dalam negeri yang inovatif, berkarakter, berpengetahuan, terampil dan dinamis terhadap perkembangan pemerintahan. Tuntutan utama terhadap pendidikan tinggi kepomongprajaan adalah sejauh mana kader pemerintahan dalam negeri yang dihasilkan IPDN mampu untuk menjawab tantangan pembangunan Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang.

Salah satu upaya untuk menghasilkan kader pemerintahan dalam negeri yang mampu dan cepat dalam beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan adalah dengan melakukan pengembangan laboratorium, tentu diperlukan Kerjasama dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari lingkungan Kerjasama sosial (Pratiwi, D, & Seran, S. T.,2018).

Secara sederhana fungsi laboratorium diartikan sebagai tempat untuk melakukan observasi, percobaan, pengujian, analisis atau mempraktikkan ilmu dan keterampilan tertentu. Ada berbagai fungsi laboratorium menurut artikel dari *Gene Craft Labs* antara lain (<https://genecraftlabs.com/>) : a). Meningkatkan keterampilan dan keahlian dari para peneliti dalam menggunakan peralatan yang tersedia di dalam laboratorium b). Menjadi sarana belajar bagi para peserta didik untuk mampu mengerti dan memahami seluruh ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak sehingga menjadi bersifat konkret dan nyata. Tentunya semua berkat penelitian yang dilakukan di dalam laboratorium c). Menjadi penyeimbang antara praktik dengan teori karena laboratorium menjadi tempat untuk menguji sebuah teori sehingga mampu menunjang pelajaran teori yang telah ada d). Meningkatkan berbagai aktivitas yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses, baik proses dalam ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan pembentukan sikap ilmiah.

Secara faktual, IPDN di kampus pusat secara nomenklatur telah memiliki laboratorium diantaranya laboratorium bahasa, laboratorium pemerintahan, laboratorium komputer dan system informasi serta laboratorium pemerintahan yang berada pada lembaga termasuk pada Fakultas yang melekat di masing – masing program studi, namun demikian secara substantif keberadaan laboratorium dimaksud masih belum maksimal dikarenakan, belum dapat mengeluarkan sertifikat teknis kompetensi sebagai hasil praktikum di IPDN

Melihat pada urgensinya keberadaan laboratorium sebagai sebuah zona “*learning by doing*” yang interaktif dalam menunjang pelaksanaan tugas IPDN Kampus Kalimantan Barat sebagai pendidikan terapan, maka pengembangan Laboratorium dan Teknologi Informasi dari aspek sarana dan prasarana, penguatan kurikulum dan penyiapan sumber daya manusia pengelola laboratorium yang berkompeten merupakan sebuah kewajiban, oleh karena itu, artikel ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan Rencana Strategis Pengembangan Laboratorium di Insititut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat yang fokus pada dimensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kurikulum praktikum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis rencana strategis untuk pengembangan laboratorium di IPDN Kampus Kalimantan Barat. Menggunakan metode kualitatif (Moleong,

2013) dengan pendekatan deskriptif induktif untuk mendeskripsikan data – data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi Pustaka Teknik analisis data dilakukan dengan analisis SWOT (*strengths, opportunities, weakness, threats*) kualitatif dengan reduksi data, display data dan verifikasi data / penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

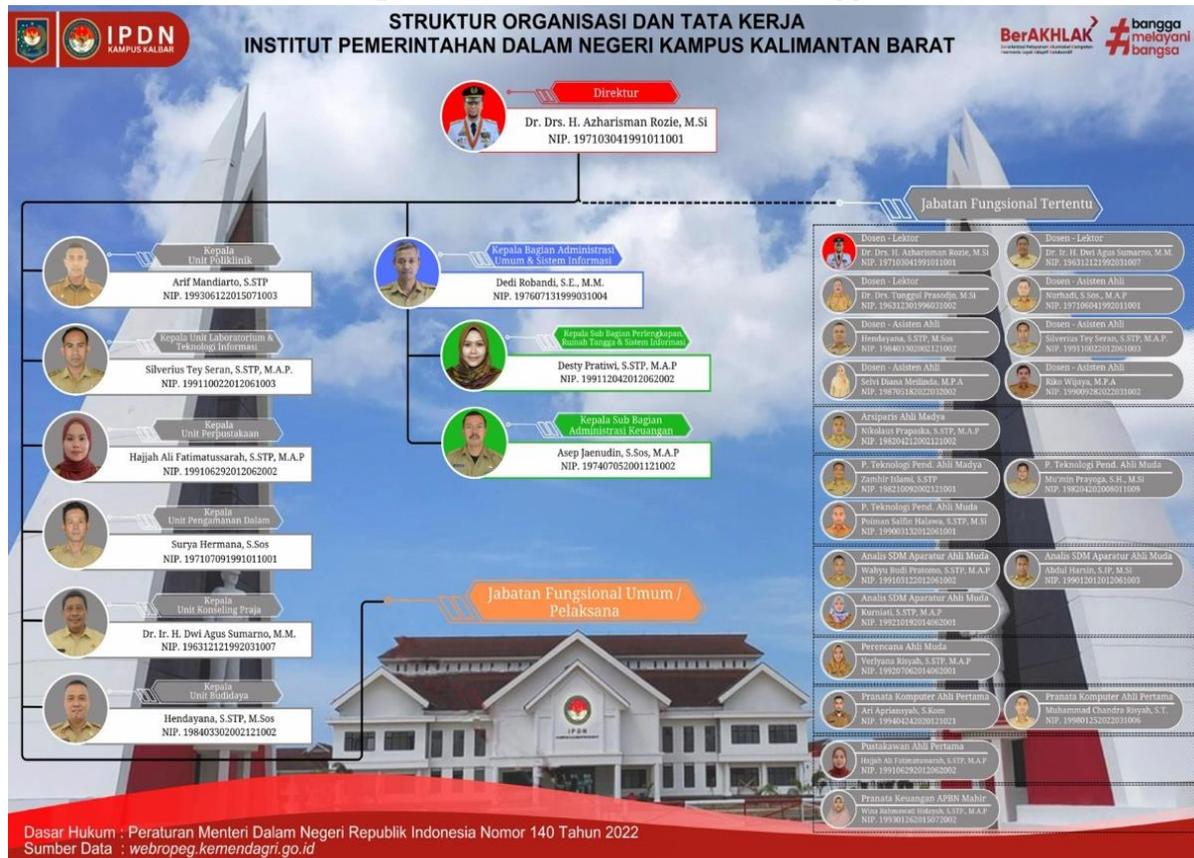
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan akan diuraikan melalui 3 (tiga) dimensi penelitian, yaitu Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan kurikulum praktikum. Sumber Daya Manusia pengelola Laboratorium di IPDN Kampus Kalimantan Barat, dalam hal pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tugas pokok dan capaian lulusan pendidikan peserta didik, merujuk pada pasal 108 Peraturan Rektor IPDN Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Kerja Di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, SDM Unit Laboratorium Dan Teknologi Informasi pada IPDN Kampus Daerah bertugas untuk menyusun rencana operasional unit laboratorium dan teknologi informasi, Menyusun rencana program pengembangan kegiatan hingga melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja.

Rincian tugas Unit Laboratorium Dan Teknologi Informasi yang termaktub dalam Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 yang disebutkan diatas, merupakan integrasi dari rincian tugas 2 (dua) unit yaitu Unit Museum Dan Laboratorium Pemerintahan dan Unit Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2018 pasal 297 dan pasal 298 Tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan IPDN. Integrasi tugas 2 (dua) unit tersebut tentu membutuhkan dukungan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam upaya implementasi tugas dimaksud untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada kondisi eksisting (September 2023), ditinjau dari kuantitas SDM unit Laboratorium dan Teknologi Informasi IPDN Kampus Kalimantan Barat dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Unit, dan 3 (tiga) orang Staf. Jabatan kepala unit, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2022 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Pasal 50, memiliki ketentuan khusus yaitu diangkat dari pelaksana akademik / dosen, dalam artian kepala unit adalah dosen yang diberikan tugas tambahan. Diketahui bersama bahwa, dosen memiliki tugas pokok dalam hal pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Menyikapi situasi ini, Kepala Unit dalam pelaksanaan tugasnya, perlu didukung oleh staf teknis yang berkompeten dari sisi kualitas dan pemahaman tugas pokok. Apabila dilihat dari kesesuaian latar belakang Pendidikan, Unit Laboratorium dan Teknologi Informasi IPDN Kampus Kalimantan Barat masih belum mumpuni dikarenakan dari 3 (tiga) orang staf, dua diantaranya merupakan pranata komputer namun terdapat satu orang staf yang memiliki latar belakang pendidikan dari bidang ilmu lain, sehingga tidak begitu linear dengan rincian tugas pada unit laboratorium dan teknologi informasi sebagaimana dijabarkan diatas. Adapun 2 (dua) orang staf pranata komputer pada kondisi sekarang juga diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tugas lain pada Bagian Administrasi Umum dan Sistem Informasi yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat. Hal tersebut berdampak pada diferensiasi pelaksanaan tugas sehingga upaya optimalisasi pelaksanaan tugas unit seringkali tumpang tindih dengan tugas pokok. Pada SOTK berikut dapat diketahui adanya kewajiban kepala unit yang juga paralel dengan tugas dosen.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK)
IPDN Kampus Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024



Sumber : webpropeg.kemendagri.go.id

B. Sarana Prasarana

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 31 disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Lebih lanjut Pasal 32 menjelaskan bahwa standar sarana dan prasarana penunjang pendidikan seminimalnya terdiri atas: Perabot; Peralatan pendidikan; Media pendidikan; Buku, buku elektronik, dan repositori; Sarana teknologi informasi dan komunikasi; Instrumentasi eksperimen; Sarana olahraga; Sarana berkesenian; Sarana fasilitas umum; Bahan habis pakai; dan Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Adapun terhadap standar sebagaimana dimaksud diatas, jumlah, jenis, dan spesifikasi ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Secara faktual, standarisasi pengadaan sarana prasarana masih dalam proses pembahasan yang direncanakan akan dituangkan dalam peraturan rektor yang lebih lanjut mengatur *roadmap* laboratorium dan teknologi informasi secara terpusat dengan Lembaga Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (LPDSI) di IPDN Kampus pusat Jatinangor. Prasarana gedung dan ruangan yang *representative* memang telah tersedia namun

sarana penunjang lainnya seperti perangkat komputer, masih belum mendukung apabila disandingkan dengan tuntutan peran unit laboratorium dan teknologi informasi kampus daerah sebagai pusat pengelolaan data pendidikan tinggi, pusat laboratorium bahasa, pusat laboratorium pemerintahan, pusat laboratorium komputer dan sistem informasi.

Adapun sarana yang dimiliki sekarang masih terbatas pada pemenuhan fungsi administrasi tata usaha. Minimnya sarana ini juga dihadapkan dengan keterbatasan anggaran tahun 2023 ini. Tidak hanya tahun anggaran 2023, namun pada tahun anggaran 2024 pun alokasi pada belanja modal penunjang sarana unit laboratorium dan teknologi informasi masih belum menjadi prioritas atau dengan kata lain tidak tersedia anggarannya. Hal ini tentu berpotensi menghambat capaian pelaksanaan program Unit Laboratorium Dan Teknologi Informasi IPDN Kampus Kalimantan Barat.

**Tabel 1. Rincian Anggaran Biaya
Unit Laboratorium Dan Teknologi Informasi
IPDN Kampus Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024**

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN	VOLUME	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Program Dukungan Manajemen		55.290.000
Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik IPDN		22.310.000
Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	22.310.000
Lokasi : Kab. Mempawah		22.310.000
Layanan Data Dan Informasi	1 Layanan	22.310.000
<i>Layanan Operasional Unit Teknologi Informasi</i>	-	<i>16.360.000</i>
Belanja Bahan	-	4.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	11.860.000
<i>Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Jaringan Menuju Smart Campus</i>	-	<i>5.950.000</i>
Belanja Bahan	-	2.050.000
Belanja Jasa Profesi	-	3.600.000
Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN		32.980.000
Layanan Manajemen SDM Internal	108 Orang	32.980.000
Lokasi : Kab. Mempawah		32.980.000
Layanan Pendidikan Kedinasan	108 Orang	32.980.000
Layanan Laboratorium Bahasa	1 Layanan	32.980.000
<i>Penyelenggaraan Operasional Laboratorium Bahasa</i>	-	<i>9.230.000</i>
Belanja Bahan	-	3.300.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	5.930.000
<i>Kegiatan Tes TOEFL/Elit Bagi Praja</i>	-	<i>23.750.000</i>
Belanja Bahan	-	1.250.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Dukungan Tes TOEFL)	-	22.500.000

Sumber : Bagian Perencanaan IPDN

Kualitas lulusan IPDN tentunya berkaitan erat dengan kualitas dan mutu perencanaan pembelajaran pada kurikulum terintegrasi. Berkenaan dengan kurikulum, apakah lulusan IPDN secara utuh sudah dibekali kecakapan yang memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai birokrat yang cakap? Pertanyaan ini sekiranya dapat terjawab oleh penguatan kurikulum yang lebih mengedepankan ilmu-ilmu terapan yang linear dengan

kegiatan-kegiatan praktikum sesuai dengan bidang keilmuan serta kebutuhan praktis pemerintahan secara faktual. Disamping itu, tentunya menjadi nilai lebih jika alumni pendidikan tinggi kepengelolaan memiliki standar kompetensi yang tersertifikasi. Sertifikasi ahli pemerintahan inilah yang menjadikan rujukan utama dalam mengatur strategi pengembangan unit laboratorium dan teknologi informasi. Hingga di tahun 2023 ini standarisasi indikator-indikator sertifikasi ahli pemerintahan di IPDN masih dalam proses pembahasan dalam lingkup Lembaga Pengelolaan Data dan Sistem Informasi yang akan disosialisasikan lebih lanjut pada unit laboratorium dan teknologi informasi di IPDN Kampus Kalimantan Barat sehingga pencapaian tujuan dapat berjalan secara simultan. Sertifikasi standarisasi secara tidak langsung juga dapat mengarahkan fokus prioritas baik dari sisi program maupun anggaran sehingga pada akhirnya unit laboratorium dan teknologi informasi dapat berperan sebagai penghubung yang memiliki relevansi yang tinggi antara kurikulum praktikum dengan praktik pemerintahan sesungguhnya.

Aspek rencana strategis pengembangan laboratorium akan dianalisa menggunakan analisis SWOT pada dimensi SDM, Sarana Prasarana, dan Kurikulum Praktikum. Kualitas SDM menjadi salah satu faktor penentu dalam mencapai keberhasilan program. Pada IPDN Kampus Kalimantan Barat secara keseluruhan terdapat kesenjangan kebutuhan formasi jabatan fungsional berjumlah 28 orang sesuai klasifikasi kebutuhan, kesenjangan ini diketahui dari kondisi existing 18 dan jumlah kebutuhan 46. Apabila dilihat lebih khusus dalam tabel kebutuhan formasi IPDN Kalbar belum tercantum jabatan fungsional pranata laboratorium yang notabene dibutuhkan dalam pengelolaan laboratorium, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel informasi jabatan fungsional berikut :

Tabel 2.
Informasi Jabatan Fungsional IPDN Kampus Kalimantan Barat

NAMA JABATAN	JUMLAH	EXISTING	KEBUTUHAN FORMASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	46	18	28
Analisis Kepegawaian Muda	4	3	1
Arsiparis Madya	3	1	2
Arsiparis Muda	3	0	3
Auditor Penyelia	1	0	1
Dokter Gigi Madya	1	0	1
Dokter Gigi Muda	1	0	1
Dokter Umum Muda	1	0	1
Dosen (Asisten Ahli)	5	5	0
Dosen (Lektor)	3	2	1
Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	1	1	0
Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	4	2	2
Perawat Gigi Muda	1	0	1
Perawat Muda	1	0	1
Perencana Muda	2	1	1
Pranata Hubungan Masyarakat Muda	1	0	1
Pranata Komputer Ahli Pertama	2	2	0
Pranata Komputer Madya	4	0	4
Pranata Komputer Muda	6	0	6
Pustakawan Pertama	2	1	1

Sumber : Bagian Administrasi Umum IPDN Kalbar

Pada Statuta IPDN (Permendagri 80, 2022) pelaksanaan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem ini terdiri atas teori, praktik, maupun integrasi teori dan praktik. Pada praktiknya belum ada pedoman yang baku dalam kolaborasi peran fungsi – fungsi laboratorium dalam mendukung proses pembelajaran di kelas. Diketahui bahwa kolaborasi belum terjadi antar stakeholder tenaga pengajar dengan manajemen laboratorium dalam penyusunan kurikulum sehingga output program laboratorium belum simultan berjalan.

Analisa lebih lanjut untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam penyusunan strategi, peneliti menggunakan Analisis SWOT (*Albert S. Humphrey, 1960*), Pada indikator kekuatan, diketahui bahwa IPDN Kampus Kalimantan Barat telah memiliki prasarana gedung yang memadai dalam mendukung peran sebagai laboratorium pemerintahan, bahasa, dan komputer. Selain prasarana terdapat kekuatan dalam regulasi kebijakan Peraturan Rektor IPDN yang menghendaki keberadaan Laboratorium Pemerintahan Berbasis Program Studi sehingga meningkatkan relevansi antara teori dan praktikum. Kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Rektor IPDN Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 31 yang mengatur tentang penyelenggaraan tugas unit laboratorium program studi, pangkalan data dan sistem informasi. Pada tanggal 02 Agustus tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 yang juga pada pasal 60 menjadi momentum terbentuknya Lembaga Pengelolaan Data dan Sistem Informasi yang berkonsentrasi pada pengelolaan data dan sistem informasi yang tentu memiliki peran signifikan dalam menyusun kebijakan dan sasaran pengelolaan data Pendidikan tinggi berbasis data tunggal. Hasil kebijakan strategis dapat berdampak langsung dalam peningkatan program kegiatan Unit Laboratorium dan Teknologi Informasi IPDN Kampus Kalimantan Barat.

Pada indikator kelemahan, diketahui bahwa : masih terdapat kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kebutuhan akan SDM fungsional khususnya tenaga fungsional pengelola laboratorium / laboran. Selain SDM juga diketahui kelemahan pada keterbatasan anggaran IPDN Kampus Kalimantan Barat dalam hal belanja modal dalam menunjang pengadaan sarana perangkat komputer sehingga belum menjadi prioritas di tahun 2024.

Kemudian belum terintegrasinya kurikulum yang telah disusun oleh pihak Fakultas dengan pihak lembaga pengelolaan data dan sistem Informasi. Dalam upaya mengembangkan Unit Laboratorium Dan Teknologi Informasi di IPDN Kampus Kalimantan Barat, terdapat beberapa **peluang** yang merupakan point eksternal sehingga bisa menjadi faktor pendukung, diantaranya : Dukungan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pengembangan SDM yang mumpuni baik dalam teori maupun praktik sehingga mendorong IPDN untuk menghadirkan Laboratorium yang berkualitas. Kemudian hadirnya Budaya Organisasi Ber-Akhlak, juga membuka Peluang IPDN untuk berkolaborasi dengan mitra IPDN baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pihak swasta dalam rangka pengembangan Laboratorium dan Teknologi Informasi IPDN Kampus Kalimantan Barat. Kolaborasi ini diperlukan dalam menjangkau fasilitas pembelajaran yang belum tersedia di laboratorium IPDN Kampus Kalbar. Pada aspek **ancaman**, diketahui beberapa faktor diantaranya ancaman era disrupsi memungkinkan perkembangan lingkungan

dan kebutuhan akan Laboratorium Pemerintahan IPDN menjadi lebih dinamis dan kompleks, selain itu Inovasi dan perkembangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lainnya yang secara dinamis menjadi pesaing IPDN untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, sehingga perlu disikapi dengan rencana – rencana strategis pengembangan IPDN khususnya laboratorium.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan program laboratorium khususnya pada Unit Laboratorium Dan Teknologi Informasi di IPDN Kampus Kalimantan Barat masih belum berjalan optimal dikarenakan beberapa hal diantaranya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan kondisi eksisting SDM di IPDN Kalbar, lebih khusus belum adanya formasi tenaga fungsional pengelola laboratorium (laboran), belum adanya sarana pendukung berupa paket perangkat computer yang juga belum menjadi prioritas di tahun 2024 dan belum terintegrasinya penyusunan kurikulum dengan melibatkan seluruh stakeholder, diantaranya pihak Fakultas, Akademik, LPDSI, para dosen / tenaga pengajar serta penerima manfaat baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (*Public Policy*), Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta : CV. Rajawali.
- Labs, GeneCraft. 2021. *Pengertian Laboratorium Beserta Fungsi Dan Jenis*. Jakarta. <https://genecraftlabs.com/pengertian-laboratorium>.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Riset Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Peraturan Rektor IPDN Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan IPDN.
- Peraturan Rektor IPDN Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Kerja Di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Pratiwi, D., & Seran, S. T. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Asn Melalui Aplikasi Penilaian Kinerja Aparatur (Sikerja) Di Ipdn Kampus Kalimantan Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 165–176. <https://doi.org/10.33701/jt.v10i2.529>
- Nawawi Hadari, M. H. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Richard, Decaprio. 2013. *Tips Mengelola Laboratorium Sekolah*. Diva Press.

Rona, Indonesia. 2019. Penerapan Analisis SWOT Dalam Perusahaan.
https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT

Rustaman dan Nisa. (2011). *Model Pembelajaran Berbasis Peningkatan Keterampilan Proses Sains. Jurnal Pendidikan Dasar. Vol.7, No.1, 1-13.*

Silalahi, Ulber. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.